



# RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2025



## RENCANA KINERJA TAHUN 2025 MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Jakarta, 2 Januari 2024

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA



SUGIYANTO